Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 7 No 6 Tahun 2026

KOLABORASI LSM DAN BENGKEL APPEK DALAM ADVOKASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KAMPUNG

Febriana Yorlina Soge, Jesika K. Adelia, Andre A. Miha Raja, Aldy M. F Dju Bire
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
Email : febrianasoge@gemail.com, jesikaadelia07@gmail.com, andreradja6@gmail.com, aldymfdjubire@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pembelajaran Komunitas (APPeK) sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam advokasi kebijakan publik dan pemberdayaan komunitas di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dilaksanakan di Bengkel APPeK NTT selama periode September–Oktober 2025 dengan pendekatan penguatan kapasitas institusional. Metode pelaksanaan meliputi pengumpulan dan analisis data sekunder, telaah dokumentasi program, serta analisis kualitatif terhadap strategi advokasi dan pemberdayaan yang telah dijalankan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan melalui refleksi program dan penyusunan rekomendasi strategis mampu meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program Bengkel APPeK. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan peran Bengkel APPeK sebagai agen perubahan sosial yang mendorong partisipasi warga, transparansi pemerintahan, dan pembangunan lokal yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: pengabdian kepada masyarakat, penguatan kelembagaan, pemberdayaan komunitas, advokasi kebijakan, organisasi masyarakat sipil.

ABSTRACT

This Community Service Program aims to strengthen the institutional capacity of Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pembelajaran Komunitas (APPeK), a civil society organization engaged in public policy advocacy and community empowerment in East Nusa Tenggara. The program was conducted at Bengkel APPeK NTT from September to October 2025 using an institutional capacity-building approach. The methods included secondary data collection, program documentation review, and qualitative analysis of advocacy and empowerment strategies implemented by the organization. The results indicate that institutional strengthening through program reflection and strategic recommendation development enhances the effectiveness of planning, implementation, and sustainability of Bengkel APPeK's programs. This activity contributes to reinforcing Bengkel APPeK's role as an agent of social change in promoting citizen participation, government transparency, and inclusive and equitable local development.

***Keywords**: community service, institutional strengthening, community empowerment, policy advocacy, civil society organization.*

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234.KK.443
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) dalam dekade terakhir (2015–2025) semakin dipandang sebagai paradigma alternatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, khususnya di wilayah yang masih menghadapi ketimpangan pembangunan. Kampung sebagai satuan sosial, ekonomi, dan kultural memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan lokal. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak kampung di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya kapasitas kelembagaan lokal, minimnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, ketergantungan pada bantuan eksternal, serta lemahnya akses terhadap sumber daya publik dan informasi. (Rasit, 2015; Supriatna, 2023).

Mitra masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini adalah komunitas kampung yang berada di wilayah dampingan Bengkel APPeK, sebuah organisasi lokal yang selama lebih dari satu dekade berperan dalam pendampingan masyarakat berbasis akar rumput (grassroots empowerment). Permasalahan utama yang dihadapi mitra mencakup lemahnya kapasitas advokasi warga untuk memengaruhi kebijakan publik di tingkat lokal, belum adanya forum warga yang kuat dan mandiri, serta keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak dasar warga negara dalam konteks pembangunan kampung. Tantangan lain yang muncul adalah kesenjangan dalam pengelolaan potensi lokal di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya padahal potensi tersebut dapat menjadi dasar bagi pembangunan kampung yang mandiri dan berkelanjutan (Supriatna, 2023).

Kondisi ini menjadi latar penting bagi perlunya intervensi pengabdian masyarakat yang bersifat transformatif dan partisipatif, bukan hanya teknis atau karitatif. Pendekatan ini menekankan penguatan kapasitas warga melalui pendidikan kritis dan advokasi komunitas sebagai langkah awal untuk membangun kampung yang berdaulat secara sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Bengkel APPeK memiliki nilai strategis. Kolaborasi tersebut tidak hanya mempertemukan dua entitas dengan pendekatan berbeda, tetapi juga menjadi wadah untuk memperluas ruang partisipasi warga dan memperkuat gerakan masyarakat sipil di tingkat lokal(Supriatna, 2023)

LSM sebagai aktor non-negara tetap memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan keadilan sosial dan demokratisasi pembangunan. Melalui pendekatan advokasi, fasilitasi, dan pengorganisasian masyarakat, LSM berkontribusi dalam menciptakan ruang-ruang demokrasi baru yang lebih inklusif. Sementara itu, Bengkel APPeK yang bekerja langsung dengan komunitas memiliki keunggulan dalam memahami dinamika sosial lokal serta membangun jaringan sosial yang kuat di tingkat kampung. Kolaborasi keduanya dapat menjawab keterbatasan masing-masing pihak dan menghasilkan model kerja kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan (Heaton et al., 2024).

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas warga kampung dalam melakukan advokasi kebijakan dan mengembangkan pemberdayaan berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk ruang dialog yang konstruktif antara warga dengan para pemangku kebijakan di tingkat lokal, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara efektif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kelembagaan warga, seperti forum kampung atau kelompok advokasi, agar mampu berperan secara mandiri dalam mengawal kebijakan publik dan mengorganisasi kepentingan bersama. Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong munculnya berbagai inisiatif lokal yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal, sebagai wujud konkret dari pembangunan kampung yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Di samping itu, kegiatan ini juga akan mendokumentasikan praktik-praktik baik (best practices) hasil kolaborasi antara LSM dan Bengkel APPeK, sehingga dapat dijadikan model pembelajaran dan replikasi bagi komunitas di daerah lain. (Wallerstein et al., 2020).

Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan muncul hasil konkret berupa meningkatnya kapasitas warga dalam menyusun agenda advokasi lokal, terbentuknya forum-forum warga yang aktif dan mandiri, serta tersusunnya dokumen perencanaan kampung yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih jauh lagi, diharapkan terbangun kemitraan yang kuat antara masyarakat, LSM, dan pemerintah lokal dalam mewujudkan pembangunan kampung yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Bengkel APPeK Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berlokasi di RSS Baumata RT 025/RW 11, Kecamatan Maulafa, Kabupaten Kupang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama dua bulan, yakni pada periode September hingga Oktober 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Bengkel APPeK merupakan lembaga swadaya masyarakat yang telah memiliki pengalaman panjang sejak tahun 2006 dalam bidang advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kampung di wilayah NTT. Lembaga ini secara konsisten berperan dalam merespons berbagai persoalan struktural, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya lokal. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan Bengkel APPeK guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah dijalankan, tanpa melibatkan masyarakat secara langsung dalam skala luas.

Perangkat pendukung yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi peralatan elektronik dan bahan dokumentasi. Peralatan elektronik terdiri atas laptop, printer, telepon genggam, dan proyektor yang dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen, pengolahan data, serta penyajian hasil analisis. Sementara itu, bahan pendukung mencakup dokumen cetak seperti laporan tahunan Bengkel APPeK, modul pelatihan, publikasi akademik, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah dan lembaga riset. Keseluruhan alat dan bahan tersebut digunakan untuk menunjang proses analisis terhadap strategi advokasi dan pemberdayaan yang telah diterapkan oleh Bengkel APPeK, sehingga memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai pendekatan dan capaian lembaga selama ini.

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan pengumpulan data sekunder dan dokumentasi program yang telah dilaksanakan oleh Bengkel APPeK. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah pola, strategi, serta praktik advokasi dan pemberdayaan yang dijalankan dalam merespons isu-isu sosial, ekonomi, dan politik di wilayah kerja lembaga. Analisis ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menemukan peluang penguatan dan pengembangan program di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim pengabdian menyusun rekomendasi strategis yang diarahkan untuk memperkuat peran Bengkel APPeK sebagai agen perubahan sosial yang berpihak pada kelompok miskin dan marjinal. Melalui pendekatan ini, kegiatan pengabdian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan, sehingga Bengkel APPeK mampu menjalankan perannya secara lebih optimal dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kelembagaan Bengkel APPeK dan Praktik Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat

Bengkel APPeK (Advokasi Pemberdayaan dan Pembelajaran Komunitas) merupakan organisasi masyarakat sipil yang berdiri sejak tahun 2006 dan secara konsisten bergerak dalam bidang pemberdayaan warga serta advokasi kebijakan publik. Fokus utama organisasi ini

diarahkan pada penguatan transparansi pemerintahan, peningkatan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam konteks daerah yang masih dihadapkan pada persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, kehadiran Bengkel APPeK menjadi aktor strategis dalam memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan.

Dalam menjalankan mandat organisasionalnya, Bengkel APPeK tidak bekerja secara eksklusif atau terisolasi, melainkan membangun jejaring kolaboratif dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa mitra strategis yang pernah bekerja sama dengan Bengkel APPeK antara lain Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Oxfam, Food and Agriculture Organization (FAO), AusAID, Ford Foundation, Yayasan PIKUL, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kerja sama ini dilandasi oleh kesamaan visi dan kepentingan, yakni mendorong perubahan sosial yang berorientasi pada keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta penguatan posisi tawar masyarakat dalam proses pembangunan.

Semangat kolaborasi yang dibangun Bengkel APPeK berangkat dari kesadaran bahwa perubahan sosial yang bersifat struktural tidak dapat dicapai oleh satu organisasi secara unilateral. Oleh karena itu, Bengkel APPeK mengusung prinsip *Gerakan Bersama*, yakni suatu pendekatan kolektif yang menempatkan sinergi antarlembaga sebagai prasyarat utama bagi terciptanya perubahan sosial yang luas dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Bengkel APPeK memandang masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat program, melainkan sebagai aktor utama yang harus diberdayakan agar memiliki pengetahuan, keberanian, serta posisi yang setara dalam berdialog dan bernegosiasi dengan negara maupun aktor pembangunan lainnya.

Proses Terbentuknya Kolaborasi Antar Lembaga

Kolaborasi antara Bengkel APPeK dan lembaga mitra umumnya diawali dari identifikasi kebutuhan nyata di tingkat akar rumput. Proses ini dilakukan melalui pemetaan sosial dan refleksi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti tingginya praktik korupsi di tingkat desa, rendahnya partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, serta lemahnya kapasitas masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Berdasarkan temuan tersebut, Bengkel APPeK kemudian menyusun proposal program yang dirancang secara kontekstual untuk merespons persoalan-persoalan tersebut.

Proposal program selanjutnya diajukan kepada mitra LSM yang memiliki fokus isu dan kepentingan yang sejalan. Apabila proposal disetujui, maka kedua belah pihak menyusun rencana kerja bersama yang mencakup tujuan program, pembagian peran, indikator capaian, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Salah satu contoh konkret dari proses kolaborasi ini adalah pelaksanaan program pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah. Program tersebut dirancang setelah Bengkel APPeK mengidentifikasi bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi pada level birokrasi pemerintahan desa, tetapi juga telah merambah ke institusi pendidikan. Menyadari urgensi persoalan tersebut, Bengkel APPeK menggandeng mitra yang memiliki perhatian pada isu tata kelola pemerintahan dan pendidikan untuk melaksanakan pelatihan serta kampanye antikorupsi di sekolah-sekolah di beberapa dusun dampingan.

Dalam setiap kerja sama, pembagian peran antara Bengkel APPeK dan mitra dirancang secara jelas dan proporsional. Bengkel APPeK berperan sebagai pelaksana lapangan yang melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat, memfasilitasi pelatihan, serta mengorganisasi kegiatan warga. Sementara itu, mitra LSM umumnya berperan dalam mendukung pendanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pendokumentasian dan

evaluasi program. Pola pembagian peran ini memungkinkan setiap pihak berkontribusi sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki.

Pendekatan Partisipatif dan Pelibatan Masyarakat

Salah satu karakteristik utama dari pendekatan Bengkel APPeK adalah penggunaan metode partisipatif dalam setiap tahapan program. Masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pelibatan ini tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang diawali dengan penguatan kapasitas masyarakat. Kegiatan penguatan kapasitas tersebut meliputi pelatihan, diskusi kelompok terfokus, serta kegiatan belajar bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Melalui proses ini, masyarakat didorong untuk memahami mekanisme pemerintahan dan pembangunan, termasuk ruang-ruang partisipasi formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Contoh implementasi pendekatan ini dapat dilihat dalam salah satu kegiatan pendampingan di dusun dampingan Bengkel APPeK, di mana warga diberikan pelatihan mengenai hak atas informasi publik, teknik penyampaian aspirasi kepada pemerintah desa, serta metode pemantauan anggaran desa. Dampak dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya keberanian dan partisipasi warga dalam forum-forum desa, di mana mereka mulai aktif bertanya, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap rencana pembangunan desa.



Gambar 1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Kelompok Rentan) Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal

Pembagian Peran dengan Mitra dan Tata Kelola Program

Dalam kerja sama dengan mitra, Bengkel APPeK menerapkan sistem pembagian peran yang berbasis pada kejelasan fungsi dan akuntabilitas. Misalnya, dalam kolaborasi dengan Yayasan PIKUL yang berfokus pada isu penguatan ekonomi lokal, Bengkel APPeK bertanggung jawab dalam pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat, seperti kelompok perempuan dan pelaku UMKM. Sementara itu, Yayasan PIKUL berperan dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan model usaha yang berkelanjutan. Dalam kerja sama dengan LSM tingkat nasional, mitra umumnya menyediakan dukungan anggaran, sedangkan Bengkel APPeK mengelola implementasi program di lapangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Laporan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana, tetapi juga menjadi instrumen refleksi dan evaluasi program. Melalui laporan ini, Bengkel APPeK dan mitra dapat menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta merumuskan strategi perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang.

Kendala dalam Kolaborasi dan Strategi Penanganan

Dalam praktik kolaborasi, Bengkel APPeK tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan perbedaan prinsip kerja, sistem pelaporan, serta pendekatan terhadap masyarakat. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan miskomunikasi atau keterlambatan dalam pelaksanaan program. Namun demikian, Bengkel APPeK merespons kendala tersebut melalui komunikasi yang terbuka dan dialog berkelanjutan dengan mitra. Fleksibilitas organisasi dalam menyesuaikan diri dengan aturan mitra, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar pemberdayaan masyarakat, menjadi salah satu kunci keberlanjutan kerja sama.

Analisis Teoretis: Pemberdayaan dan Pendidikan Kritis

Jika ditinjau dari perspektif teori pemberdayaan masyarakat, pendekatan Bengkel APPeK mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*). Masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama perubahan sosial, bukan sekadar objek penerima manfaat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *community empowerment* yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar memiliki kontrol terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Christens, 2019).

Selain itu, praktik Bengkel APPeK juga relevan dengan teori pendidikan kritis Paulo Freire (1970) yang menolak model pendidikan satu arah (*banking system*) dan mendorong dialog reflektif sebagai sarana pembebasan. Melalui kegiatan seperti Sekolah Komunitas Kampung dan Forum Warga Desa, Bengkel APPeK menciptakan ruang belajar kolektif yang memungkinkan masyarakat mengidentifikasi persoalan struktural yang mereka hadapi serta merumuskan solusi melalui tindakan bersama (*praxis*).

Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap program, sekaligus meningkatkan keberlanjutan intervensi. Berbeda dengan pendekatan top-down yang sering kali gagal karena minimnya keterlibatan masyarakat, model Bengkel APPeK justru memperkuat kapasitas lokal dan kelembagaan komunitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Ledwith (2022) yang menegaskan bahwa pemberdayaan sejati tercapai ketika masyarakat memiliki kekuatan untuk mendefinisikan masalahnya sendiri dan mengambil tindakan kolektif untuk mengatasinya.

Dengan demikian, Bengkel APPeK dapat dipahami sebagai contoh penerapan konkret teori pemberdayaan dan pendidikan kritis dalam konteks pembangunan lokal di Indonesia. Organisasi ini tidak hanya mentransfer pengetahuan atau memberikan bantuan material, tetapi berfokus pada transformasi kesadaran sosial, penguatan kapasitas warga, dan pembentukan struktur komunitas yang mandiri, demokratis, serta berkeadilan.

KESIMPULAN

Bengkel APPeK merupakan organisasi masyarakat sipil yang berperan strategis dalam mendorong pemberdayaan warga dan penguatan demokrasi lokal di Nusa Tenggara Timur melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Sejak berdiri pada tahun 2006, Bengkel APPeK secara konsisten menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan dengan menekankan penguatan kapasitas, kesadaran kritis, serta keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Kolaborasi dengan berbagai LSM nasional dan internasional memperkuat efektivitas program melalui dukungan sumber daya, penguatan kelembagaan, dan legitimasi advokasi. Pembagian peran yang jelas antara Bengkel APPeK sebagai pendamping lapangan dan mitra sebagai pendukung strategis menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program. Pendekatan ini terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

forum-forum pembangunan serta memperkuat posisi tawar warga dalam mengawasi kebijakan publik.

Secara teoretis dan praktis, model pemberdayaan Bengkel APPeK selaras dengan teori pemberdayaan masyarakat dan pendidikan kritis yang menekankan pendekatan *bottom-up*, dialog, dan tindakan kolektif. Oleh karena itu, praktik yang dikembangkan Bengkel APPeK dapat dipandang sebagai model pemberdayaan yang relevan dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan lokal yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, R. A., Permana, A., Yani, Y. M., & Mursitama, T. N. (2024). Implementing SDG to village level by integrating social capital theory and value chain: Case of village tourism Pentingsari in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of ASEAN Studies (JAS), 7*(2). https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.5780

Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative governance in theory and practice: An update. *Journal of Public Administration Research and Theory, 28*(1), 1–20. https://doi.org/10.1093/jopart/mux044

Bengkel APPeK. (2021). *Profil dan program kerja Bengkel APPeK NTT*. Diakses dari https://bengkelappek.org/program

Christens, B. D. (2019). *Community power and empowerment*. Oxford University Press.

Ledwith, M. (2022). *Community development: A critical approach* (3rd ed.). Bristol University Press.

Lestari, R. A., Anggara, M., & Anita, S. (2021). Kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10*(3), 245–258. https://doi.org/10.22373/jish.v10i3.10123

Nugraha, B., Safitri, D., & Faisal, M. (2022). Modal sosial sebagai penggerak pemberdayaan komunitas desa: Studi pada program desa mandiri. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 7*(1), 45–56. https://doi.org/10.22146/jppm.64231